

Senin, 15 Mei 2023

1. [HOAKS] Akun Facebook Mengatasnamakan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri



Penjelasan :

Beredar sebuah akun Facebook yang mengatasnamakan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo. Akun Facebook tersebut menggunakan foto Hadi Prabowo sebagai foto profilnya dan mengunggah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rektor IPDN.

Faktanya, akun Facebook yang mengatasnamakan Rektor IPDN Hadi Prabowo tersebut adalah tidak benar. Humas IPDN melalui akun Twitter resminya [@HumasIpdn](https://twitter.com/HumasIpdn), mengklarifikasi bahwa akun tersebut merupakan akun palsu. Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa segala informasi yang terdapat dalam akun tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hoaks

Link Counter:

- <https://twitter.com/HumasIpdn/status/1657671515301871617>



KOMINFO

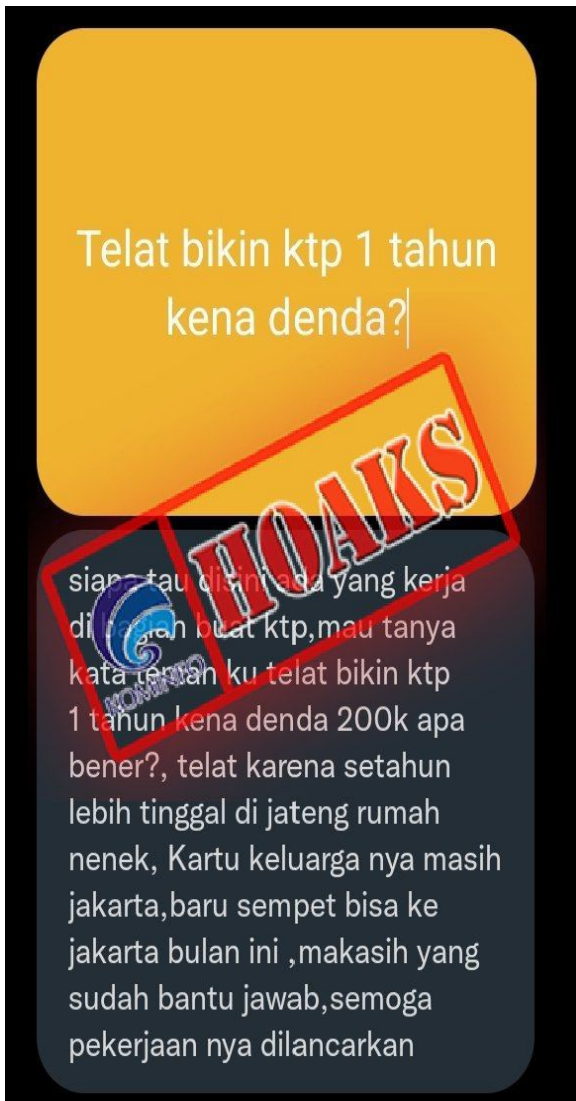
LAPORAN ISU HOAKS

Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Senin, 15 Mei 2023

2. [HOAKS] Terlambat Membuat KTP 1 Tahun Dikenakan Denda



Penjelasan :

Beredar sebuah tangkapan layar dari unggahan WhatsApp Story yang memuat informasi bahwa jika terlambat membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama satu tahun akan dikenakan denda. Denda yang dikenakan akibat keterlambatan dalam pembuatan KTP sebesar Rp200 ribu.

Faktanya, informasi pada tangkapan layar tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari [kompas.com](https://www.kompas.com), Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi membantah adanya denda dan pihaknya juga tidak memiliki rencana pemberian denda untuk keterlambatan pembuatan KTP tersebut. Memang ada pasal terkait dengan keterlambatan pelaporan KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di mana dalam Pasal 89 dan 90 dijelaskan tentang denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Namun, kebijakan Dukcapil tersebut juga telah disampaikan ke daerah-daerah agar denda dijadikan Rp0 sehingga tidak memberatkan penduduk dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan undang-undang.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/06/200000165/ramai-soal-telat-membuat-ktp-bisa-kena-denda-rp-200000-ini-penjelasan?page=all>

Senin, 15 Mei 2023

3. [HOAKS] Situs Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak



Penjelasan :

Beredar situs dengan alamat djp-online-pajak-go-id.com mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Tampilan situs tersebut terlihat mirip dengan situs DJP serta menggunakan logo dari DJP.

Faktanya, DJP melalui akun Twitter resminya [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI), mengklarifikasi bahwa situs tersebut adalah modus penipuan *phishing* yang mengatasnamakan DJP. Situs resmi milik DJP beralamatkan pajak.go.id.

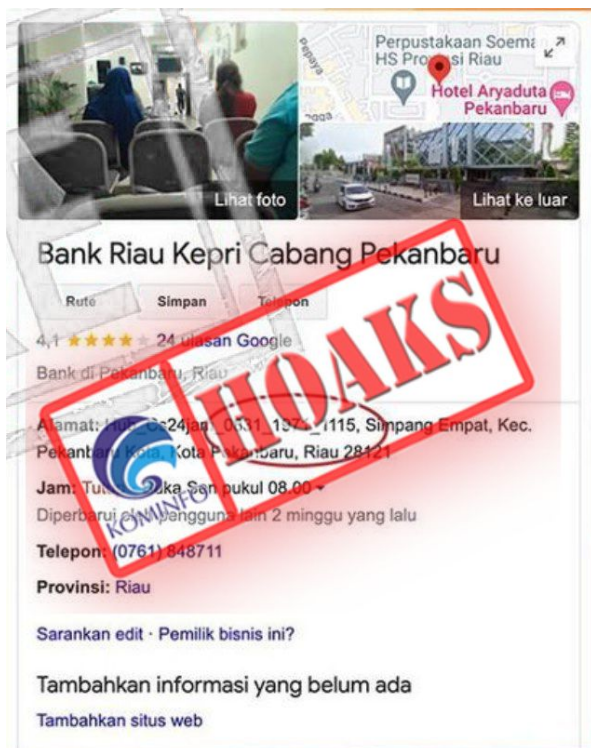
Hoaks

Link Counter:

- <https://twitter.com/DitjenPajakRI/status/1657968279699456000>

Senin, 15 Mei 2023

4. [HOAKS] Akun Bisnis dan Nomor *Call Center* Mengatasnamakan Bank Riau Kepri Syariah



Penjelasan :

Beredar akun bisnis dan nomor *call center* mengatasnamakan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Akun bisnis tersebut mengeklaim lokasi dan mencantumkan nomor *call center* pada halaman hasil pencarian Google Maps Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.

Faktanya, BRK Syariah melalui akun Instagram resminya [@brksyariah](https://www.instagram.com/brksyariah/), mengklarifikasi bahwa akun bisnis dan nomor *call center* tersebut adalah palsu. Pihaknya mengimbau para pelanggan untuk berhati-hati kepada pihak yang mengatasnamakan BRK Syariah. Informasi resmi mengenai BRK Syariah dapat diakses melalui akun media sosial dan *call center* resmi BRK Syariah di 1500470.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.instagram.com/p/CrKtdLSPNJU/>